

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos/ Radar Semarang	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah: Kabupaten Pekalongan

Halaman 12

Brison Minta Penambahan Kuota

► 846 Guru Honorer di Kabupaten Pekalongan Belum Terima Insentif

KAJEN, TRIBUN - Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) Kabupaten Pekalongan melakukan koordinasi bersama pemkab dan DPRD, menyusul sebanyak 846 guru honorer di wilayah itu yang belum terdaftar sebagai penerima insentif.

Brison Setiadi, Ketua PGSI Kabupaten Pekalongan, mengatakan, sosialisasi terkait dengan pemberian insentif kepada guru honorer yang dilakukan sejak 2017 belum maksimal.

"Banyak guru honorer yang hingga kini belum tahu tentang adanya uang insentif tersebut,"

katanya, saat rapat koordinasi di Gedung DPRD Kabupaten Pekalongan, Selasa (12/2).

Menurut dia, tidak hanya para pengajar, pihak sekolah juga tidak semua mendapat sosialisasi mengenai adanya uang insentif bagi guru honorer itu.

"Bahkan, banyak sekolah belum tahu bahwa penjaga sekolah juga berhak diusulkan mendapatkan uang insentif," ujarnya.

Dalam rapat koordinasi itu, Brison berharap ada penambahan kuota insentif untuk para guru dan penjaga sekolah di Kabupaten Pekalongan.

"Memang selama ini sebagian sudah mendapatkan insentif sebesar Rp 200 ribu dari pemkab, tetapi tambahan itu untuk yang sudah terdata dalam data base, dan yang tidak terdaftar ya tidak dapat," jelasnya.

Mengusulkan

Adapun, Kundarto, anggota Komisi D DPRD Kabupaten Pekalongan, akan mengusulkan pendataan ratusan guru honorer yang belum masuk ke data base penerima insentif itu.

"Kami akan segera koordinasi bersama pemkab terkait dengan pendataan tersebut, karena

STORY HIGHLIGHTS

- Sebanyak 846 guru honorer di Kabupaten Pekalongan hingga kini belum terdaftar sebagai penerima insentif dari pemkab sejak 2017.
- Sosialisasi pemberian insentif kepada guru honorer yang dilakukan sejak 2017 belum maksimal, sehingga banyak pihak terkait belum mengetahui.
- DPRD akan segera berkoordinasi dengan pemkab untuk mengusulkan pendataan ratusan guru honorer yang belum masuk ke data base penerima insentif.

peran guru sangat vital dalam mencerdaskan bangsa," ucapnya.

Menurut dia, koordinasi harus dilakukan karena penambahan kuota insentif guru tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

"Tapi kami akan tetap mengusulkan untuk mendata ratusan guru honorer tersebut ke pemkab," tandasnya.

Sebelumnya, Bupati Pekalongan, Asip Kholbihi sempat menyampaikan, pemberian tunjang-

an guru non-PNS, termasuk guru TPQ dan Madin akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pada 2019, bupati menyatakan, telah dialokasikan Rp 21 miliar lebih untuk guru SD, SMP di sekolah negeri dan swasta, serta Rp 6,6 miliar untuk guru Madin dan TPQ.

Berdasar data yang ada, jumlah guru honorer sebanyak di Kabupaten Pekalongan tercatat sebanyak 2.331 orang. Dari data itu, sebanyak 1.914 guru honorer menerima bantuan Rp 500 ribu per bulan yang telah dianggarkan sejak 2017. (bud)